JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 7 No. 1, 2024, hal 243-253 ISSN 2746-3249

Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2021

Nurul Huda*, Chairul Sa'roni
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*huda.iesp@gmail.com

Abstract
This research is a quantitative research goals were finding out and analizing the influence of poverty level, unemployment and minimum wages toward citizen welfare in South Kalimantan Province. The analizing technique used is panel data regression with the selected model, namely the Random Effect Model, combining data for 2013-2021 and cross-section data from 13 Regencies/Cities of South Kalimantan Province The data that has been obtained furthermore are analyzed by panel data regression equation analysis using the E-Views 10 Software program. This research results that poverty level, unemployment and minimum wages simultaneously had significant influences toward the welfare of South Kalimantan Province during 2013-2021. Therefore, partial analysis of the poverty level and unemployment is negatively related and not significantly correlate toward citizen welfare in South Kalimantan Province. Minimum wages positively correlated by partial and had significant effect toward citizen welfare in South Kalimantan Province.
Keywords: *Poverty; Unemployment; Minimum Wages; Citizen Welfare; HDI*

Abstrak
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis dipakai adalah regresi data panel dengan model terpilih yakni *Random Effect Model*, penggabungan data tahun 2013-2021 dan *cross-section* data sebanyak 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis persamaan regresi data panel menggunakan program *Software E-Views 10*. Penelitian ini menghasilkan analisis secara simultan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2013-2021. Sedangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta upah minimum secara parsial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kata Kunci: Kemiskinan; Pengangguran; Upah Minimum; Kesejahteraan Masyarakat; IPM

PENDAHULUAN

Tujuan akhir suatu pembangunan ekonomi yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unsur penting dalam suatu pelaksanaan pembangunan ialah dengan strategi pembangunan ekonomi yakni pembangunan pada semua aspek

kehidupan, bukan hanya mengejar kemajuan lahir namun diikuti dengan keserasian serta keseimbangan, sehingga pembangunan mampu dikatakan berhasil apabila output pembangunan berupa keadilan dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat miskin sekalipun. Pembangunan belum dapat dinyatakan berhasil apabila salah satu diantara tiga keadaan yakni kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan penduduk menjadi lebih parah walaupun penghasilan perkapita meningkat, (Chaniago, 2012). Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau negara, (Alkhoiriyah dkk., 2021).

Kesejahteraan merupakan sebuah tujuan akhir yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai salah satu poin penting yang akan dicapai tahun 2030 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, (BAPPENAS). Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi daerah yang dapat menggambarkan kemakmuran masyarakat yang tinggi. Berbagai macam indikator yang dapat diaplikasikan untuk melihat peningkatan pembangunan di suatu wilayah, baik melalui indikator ekonomi ataupun indikator sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek pertumbuhan ekonomi semata namun juga berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diterapkan sebagai alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau *HDI* (*Human Development Index)* yang diterbitkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* tahun 1990 dalam laporan tahunan *HDR (Human Development Report).* Semakin besar peningkatan IPM suatu daerah maka akan meningkatan kesejahteraan penduduk tersebut. Pembangunan manusia merupakan cara untuk memperluas kesempatan masyarakat agar dapat memenuhi kehidupan yang layak (Rahimah dkk., 2020).

Tabel 1
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kotadi Kalimantan Selatan
tahun 2013-2021

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KALSEL	**67,17**	**67,63**	**68,38**	**69,05**	**69,65**	**70,17**	**70,71**	**70,91**	**71,28**
Tanah Laut	66,11	66,50	66,99	67,44	68,00	68,49	69,04	69,38	69,87
Kota Baru	65,41	65,76	66,61	67,10	67,79	68,32	68,95	68,86	69,13
Banjar	65,36	65,71	66,39	66,87	67,77	68,32	68,94	69,18	69,89
Barito Kuala	62,12	62,56	63,53	64,33	64,93	65,91	66,24	66,22	66,64
Tapin	66,48	66,99	67,67	68,05	68,70	69,53	70,13	70,11	70,31
Hulu Sungai Selatan	64,59	65,25	66,31	67,52	67,80	68,41	68,80	68,85	69,21
Hulu Sungai Tengah	64,63	65,37	66,56	67,07	67,78	68,32	68,80	68,84	69,05
Hulu Sungai Utara	60,77	61,32	62,49	63,38	64,21	65,06	65,49	65,59	66,12
Tabalong	68,08	68,36	69,35	70,07	70,76	71,14	71,78	72,19	72,60
Tanah Bumbu	66,51	66,94	67,58	68,28	69,12	70,05	70,50	70,71	71,00

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Balangan	64,03	64,44	65,34	66,25	67,25	67,88	68,39	68,82	69,11
Banjarmasin	74,59	74,94	75,41	75,94	76,46	76,83	77,16	77,10	77,57
Banjarbaru	77,10	77,30	77,56	77,96	78,32	78,83	79,22	79,10	79,26

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan (2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan IPM di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2013-2021 mengalami kenaikan yang signifikan begitu juga dengan pertumbuhan IPM di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. IPM Kota Banjarbaru merupakan tertinggi pertama di Provinsi Kalimantan Selatan dan IPM Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tertinggi ke dua puluh di Indonesia. Berdasarkan status pengelompokkan pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Selatan tergolong ke dalam kategori tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$). Namun, pertumbuhannya terbilang lambat/stagnan harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kapasitas penduduk dengan komitmen dan kerja keras yang terstruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Topik masalah yang akan diteliti yakni: (1) bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan?. Tujuan dari penelitian ini yakni: (1) mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

PENELITIAN TERDAHULU

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan prasyarat terwujudnya kebutuhan material, spritual, serta sosial masyarakat sehingga seyogyanya mampu hidup layak dan menggembangkan diri dengan baik, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Menurut Badrudin (2012), Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menggambarkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat yang tercermin dari tarap hidup masyarakat. Kesejahteraan suatu masyarakat bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi terkait dengan beberapa faktor non ekonomi yakni faktor sosial, budaya dan politik.

Tujuan diciptakannya IPM adalah untuk menemukan indikator yang akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan di negara-negara berkembang daripada yang disediakan oleh indikator ekonomi yang ketat, Cohen (2007). Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), ada 3 (tiga) aspek dalam menentukan ukuran IPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, Irviani dkk. (2019). IPM merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai kesejahteraan antar negara wilayah maupun negara (Todaro, 2009).

Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-makanan, diukur dari segi pengeluaran. Masyarakat

dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapitanya berada dibawah garis kemiskinan (BPS, 2022). Hall dkk. (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang kekurangan materi dan sosial yang menyebabkan seseorang tersebut hidup di bawah standar hidup layak, atau keadaan di mana seseorang mengalami ketimpangan dibandingkan dengan orang lain dalam masyarakat.

Hubungan kemiskinan dengan kesejahteraan masyarakat yakni besarnya penduduk miskin sangat mempengaruhi pembangunan manusia dikarenakan penduduk miskin memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan penduduk dapat secara langsung mengurangi kemiskinan dengan cara peningkatan terhadap pendapatan, perpajakan, dan kesadaran kebijakan di antara penduduk yang lebih rentan dengan menggerakkan sejumlah penduduk di atas garis kemiskinan, (Newman dkk., 2015). Semakin tinggi kemiskinan maka akan semakin rendah kesejahteraan masyarakat, (Mulia, 2022). Dengan demikian, tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk yang dipresentasikan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), pengangguran ialah seseorang yang secara aktif sedang mencari kerjaan atau mempersiapkan kerjaan baru atau seseorang yang tidak sedang mencari kerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan atau seseorang yang tidak aktif mencari kerjaan karena sudah mempunyai kerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (2015), pengangguran ialah penduduk yang telah digolongkan pada angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan dengan tingkat gaji tertentu namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran juga didefinisikan sebagai kesempatan tidak seimbang yang terjadi antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Dalam suatu perekonomian, pengangguran yang terjadi dapat menyebabkan akibat yang buruk bagi perekonomian maupun secara individu dan masyarakat.

Hubungan pengangguran dengan kesejahteraan masyarakat ialah pengangguran mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kurang optimal, sedangkan tujuan akhir suatu pembangunan yakni mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi jumlah masyarakat yang tidak memiliki pendapatan dan semakin sulit mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dengan jumlah pengangguran yang terkendali dan penerimaan penghasilan yang meningkat, maka akan berdampak pada pertumbuhan pembangunan manusia dengan meningkatkan bagian pengeluaran rumah tangga individu yang dihabiskan untuk membeli makanan sehat serta pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengangguran dapat dilihat dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Todaro, 2000).

Menurut Sukirno (2005), mendeskripsikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah minimum ialah upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengamanan, berupa gaji tanpa tunjangan atau gaji pokok termasuk

tunjangan tetap yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Hubungan upah minimum dengan kesejahteraan masyarakat ialah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejalan dengan peningkatan upah yang menyebabkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan dasar individu terpenuhi. Kesejahteraan berhubungan positif terkait dengan upah minimum, dalam asumsi makroekonomi umum, upah yang lebih tinggi akan menawarkan pekerja lebih banyak daya beli, dengan demikian pekerja akan menuntut lebih banyak barang dan jasa (Waldman dkk., 2014).

Penelitian Rizki Afri Mulia (2022), berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini secara parsial menghasilkan tingkat kemiskinan dan produk domestik regional bruto memiliki berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Jasmine Vernadya Stevani, Sjamsul Arief (2020), berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimun, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2018. Penelitian ini menghasilkan secara parsial maupun simultan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian Shella Okky Shavira, Mohammad Balafif, Nurul Imamah (2020), berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya. Penelitian ini secara parsial menghasilkan variabel tingkat upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni tingkat kemiskinan, pengangguran, upah minimum, dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2021. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif yakni data yang diterangkan dalam bentuk angka. Data kuantitatif berguna untuk menentukan besaran atau jumlah dari suatu objek penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data digunakan adalah data Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini mengunakan regresi data panel yang merupakan penggabungan data tahun 2013 – 2021 dan *cross section* data sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antar variabel bebas (variabel tingkat kemiskinan, variabel pengangguran, dan variabel upah minimum) dan variabel terikat (variabel kesejahteraan masyarakat).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu (1) dokumentasi, melakukan pencarian data mengenai informasi berupa catatan, buku, atau notulen dan

sebagainya yang mengarah kepada sumber objek yang akan diteliti. (2) studi pustaka, mempelajari dan mengambil informasi dari referensi yang relevan dan sumber lain yang relevan memberikan informasi mengenai penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis regresi data panel untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemiskinan (X1), pengangguran (X2), dan upah minimum (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan analisis data panel yang digunakan yaitu:

$$\mathbf{Yit = \beta 0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + it + u_{it}}$$

Keterangan :

β0	: Konstanta
β_1 β_2 β_3	: Koefisien Regresi
Y	: Kesejahteraan Masyarakat
X_{1it}	: Kemiskinan
X_{2it}	: Pengangguran
X_{3it}	: Upah Minimum
u	: Eror
i	: 1,2,3……13 (data Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan)

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Kemiskinan

Bersumber dari BPS Prov. Kalimantan Selatan nilai persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013 sebesar 4,77% kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan ditahun 2015 sebesar 4,99%, kemudian menurun kembali pada tahun 2016, 2017, 2018, dan kembali meningkat dari tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi disebabkan efek pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan sebagian penduduk.

Pengangguran

Bersumber dari BPS Prov. Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pengangguran cenderung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 sebesar 3,66 % kemudian pada tahun 2014, 2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan dan terus berfluktuatif sampai tahun 2021. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Kota Banjarmasin termasuk yang paling tinggi. Tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, akibatnya banyak

masyarakat untuk mencari pekerjaan namun tingginya persaingan dalam mencari pekerjaan.

Upah Minimum

Bersumber dari BPS Prov. Kalimantan Selatan nilai Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 sebesar Rp 1.337.500 dan terus menerus mengalami peningkatan upah setiap tahunnya sampai tahun 2020, pada tahun 2021 UMP Kalimantan Selatan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dikarenakan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan yang terdampak Covid-19 yakni sebesar Rp 2.877.448.

Analisis Data

Tabel 2
Hasil Estimasi pada model *Common Effect, model Fixed Effect,* dan *model Random Effect*

Variabel	*Common Effect Model*	*Fixed Effects Model*	*Random Effect Model*
Constanta	63,11967 (0,0000)	64,45133 (0,0000)	64,56978 (0,0000)
Kemiskinan (X1)	-0,745427 (0,0110)	-0,218877 (0,1148)	-0,247325 (0,0718)
Pengangguran (X2)	1,170006 (0,0000)	-0,104414 (0,0378)	-0,092772 (0,0628)
Upah Minimum (X3)	0,000000208 (0,0000)	0,000000267 (0,0000)	0, 000000266 (0,0000)
R-Squared	0,414974	0, 992800	0, 932430
F-Statistic	26,71790 (0,000000)	928,4836 (0,000000)	519,7782 (0,000000)

Sumber: *Diolah dengan E-Views 10*

Setelah menyelesaikan teknik estimasi dengan menggunakan tiga *Common Effect Model, Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model.* Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji model untuk menentukan model yang paling cocok pengujian yang dilakukan pada data panel adalah *Uji Chow, Uji Hausman serta Uji Lagrange Multiplier*.

Tabel 3
Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier

	CEM VS FEM	FEM VS REM	CEM VS REM
Uji Statistik	Uji Chow	Uji Hausman	Uji Lagrange Multiplier
Probabilitas F	0,0000	0,0859	0,0000
Chi-Square	514,520341	-	-
Signifikansi 5%	<0,05	>0,05	<0,05
Model Terbaik	*Fixed Effect Model*	*Random Effect Model*	*Random Effect Model*

Sumber: *Diolah dengan E-Views 10*

Dari hasil pengujian dengan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* di atas dapat dilihat hasil bahwa model terbaik yang dipilih yakni *Random Effect Model.*

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Berdasarkan pengujian diketahui bahwa nilai korelasi dari ketiga variabel (kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum) tidak ada yang lebih besar dari 0,85, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7
Hasil Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.56978	1.242109	51.98399	0.0000
KMS	-0.247325	0.136067	-1.817668	0.0718
TPT	-0.092772	0.049367	-1.879230	0.0628
UMK	2.66E-06	7.98E-08	33.36925	0.0000
R-squared (R^2)		0.932430		
Adjusted R-squared		0.930636		
S.E. of regression		0.389064		
F-statistic		519.7782		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Sumber : *Diolah dengan E-Views 10*

Hasil analisis regresi data panel yang dilakukan bisa diambil suatu bentuk model persamaan dari pengaruh masing-masing variabel terhadap kesejahteraan masyarakat yakni indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Estimasi model persamaan yaitu:

$$\hat{Y}_{it} = 64{,}56978 - 0{,}247325\, X_{1it} - 0{,}092772\, X_{2it} + 0{,}00000266\, X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji-F dilakukan untuk menggambarkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Dari hasil regresi nilai probabilitas F sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0{,}05$ (0,000000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel independen (Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2021.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Pertama, Variabel X_1 (Kemiskinan) dengan nilai probability sebesar 0,0718 dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0{,}05$ (0,0718 > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemiskinan (X1) dengan kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2013-2021.

Kedua, Variabel X_2 (Pengangguran) dengan nilai probability sebesar 0,0628 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (0,0628 > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengangguran dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2013-2021.

Ketiga, Variabel X_3 (Upah Minimum) dengan nilai probability sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (0,0000 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan yang antara upah minimum dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2013-2021.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas (X) dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) dalam model yang digunakan. Berdasarkan hasil regresi nilai *R-square* sebesar 0,932430 atau 93,2430%. Penelitian ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan upah minimum secara bersama - sama menjelaskan pengaruh secara simultan sebesar 93,24% terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat. Adapun 6,76% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan yakni (1) Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2021. (2) Tingkat Kemiskinan secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2021. (3) Tingkat Pengangguran secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Mayarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2021. (4) Upah Minimum berpengaruh secara parsial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2021.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran yakni : (1) Tingkat kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks apabila berkepanjangan maka akan menyebabkan permasalahan aspek lainnya yakni aspek sumber daya alam, politik, sosial budaya, ekonomi, dll. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota membuat suatu upaya untuk mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran yang nantinya peningkatan kesejahteraan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan manusia yang optimal. Pemerintah kota juga perlu mewujudkan pembangunan yang merata serta menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pemberdayaan masyarakat agar penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan mampu menurunkan angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan. (2) Masyarakat yang

menjadi objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, seperti memanfaatkan sebaik-baiknya program dari pemerintah sehingga terciptanya keberhasilan pembangunan manusia yang berkesinambungan. (3) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor - faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menambahkan periode maupun variabel lain yang sesuai sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih konkrit.

BIBLIOGRAPHY

Sa'roni, C. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, *4*(2), 229–309.

Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UUP STIM YKPN.

BAPPENAS. (n.d.). *Sekilas SDGs*. Diambil 20 September 2022, dari https://sdgs.bappenas.go.id/

BPS. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. https://www.bps.go.id/

BPS Prov. Kalimantan Selatan. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*.

BPS Prov. Kalimantan Selatan. (2022). *Pengangguran*. https://www.bps.go.id/

Chaniago, A. A. (2012). *Gagalnya pembangunan: membaca ulang keruntuhan Orde Baru*. LP3ES.

Cohen, E. H. (2007). *Assessing the Human Development Index through the Structure of Welfare*. *October*.

Midgley, J. (2004). *Social Policy for Development*. SAGE Publications Ltd.

Kasmi, K. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925

KEMNAKER. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018*.

Mulia, R. A. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jiee: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, *2*(1), 22–27.

Kenworthy, J. (2015). *the End of Automobile Dependence: How Cities are Moving Beyond Car-Based Planning*. Island Press. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-613-4

Chandriyanti, I. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan PembangunanJurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, *5*(2), 804–818.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Arief, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Upah Minimum

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(2), 95–102. https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???

Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi : Teori Pengantar* (3 ed.). Rajawali Pers.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.

Todaro, M. P. (2009). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Oren. (2014). *A Conservative Case for the Minimum Wage*. *57*(1), 19–40.